

# Jurnalisme Damai dalam Pemberitaan Ahmadiyah pada Harian Jawa Pos

## Rindang Senja Andarini

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP Angkatan V

Email : [rindang.senja@gmail.com](mailto:rindang.senja@gmail.com)

### **Abstract:**

*Cikeusik incident attracted many citizens and media's enthusiasm since it's news worthines. When a violent conflict appear, media supposes to play role in building conflict resolution. This study aimed to examine how Jawa Pos frame and cover violent conflict. This study used qualitative approach with framing analysis method. News coverages about Ahmadiyah from February 7<sup>th</sup> 2011 till March 11<sup>th</sup> 2011 was analysed. The result showed that Jawa Pos hasn't applied peace journalism signed by the usage of victimizing and demonizing language. Jawa Pos preferred dramaticall coverage, used "unfavoured" frame and spreaded out stigma to Ahmadiyah and it's followers.*

**Key words** : conflict, peace journalism, dramaticall coverage, victimizing, demonizing language

### **Abstraksi:**

*Insiden Cikeusik menarik antusiasme banyak media dan masyarakat karena kandungan nilai beritanya yang tinggi. Ketika sebuah konflik kekerasan terjadi, media seharusnya berperan dalam membangun resolusi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana Harian Jawa Pos mbingkai dan memberitakan konflik kekerasan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing. Data yang dianalisis adalah Berita mengenai Ahmadiyah mulai 7 Februari 2011 hingga 11 Maret 2011. Hasil temuan menunjukkan bahwa Jawa Pos belum menerapkan jurnalisme damai – ditandai dengan penggunaan victimizing dan demonizing language. Jawa Pos lebih memilih pemberitaan yang mendramatisir, memakai "unfavoured" frame dan menyebarkan stigma yang ditujukan pada Ahmadiyah dan para pengikutnya.*

**Kata kunci** : konflik, jurnalisme damai, pemberitaan yang mendramatisir, victimizing, demonizing language

### **Pendahuluan**

Ahmadiyah merupakan salah satu aliran agama minoritas di Indonesia yang diklaim sebagai ajaran sesat oleh sebagian besar masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang melarang dan mengharamkan Ahmadiyah sejak 1980 dan ditegaskan lagi pada 2005. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sesuai UU No.1/PNPS/1965.

Selain mendapat intervensi yang diskriminatif dari pemerintah melalui peraturan yang dibuat, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) juga mendapat perlawanan bahkan kekerasan dari masyarakat. Dua peristiwa di antara rentetata peristiwa penyerangan terhadap JAI, antara lain: Pada 1 Oktober 2010, sekelompok orang membakar dan merusak masjid serta perumahan JAI di Kampung Cisalada, Desa Ciampea Udik, Kecamatan Ciampea Bogor. Pada Minggu, 6

Februari 2011 sekitar pukul 10.45 WIB. Terjadi penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) oleh warga Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang. Akibat bentrokan tersebut tiga orang tewas dan 20 korban luka-luka.

Banyak media memiliki prinsip bahwa konflik memiliki nilai berita yang tinggi, terutama konflik fisik. Perang, pembunuhan, kekerasan fisik biasanya ditempatkan di halaman muka (Ishwara, 2005: 53). Dalam meliput konflik, pers di Indonesia cenderung berpihak pada kelompok tertentu, memanasakan situasi konflik, serta menonjolkan unsure kekerasan (seperti jumlah korban luka-luka dan tewas, kerugian material, dan lain-lain). Media massa fokus memberitakan apa yang kasat mata tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi pihak-pihak yang bertikai.

Terkait dengan kerusuhan yang pernah terjadi di Maluku tahun 1999, *Adil, Aksi, Detak*, dan *Tekad* menggunakan kata-kata yang hiperbol dan bombas-

tis dalam pemberitaan. Tabloid tersebut cenderung mendramatisir dan melebih-lebihkan peristiwa di Maluku dengan menggunakan bahasa yang berkonotasi daripada harfiah. Bahasa yang digunakan bersifat provokatif. Mereka menggambarkan Kepulauan Maluku sebagai ladang penjalangan, menggunakan istilah perang salib atau perang suci sebagai kata ganti pertikaian di Maluku, dan menyebut Maluku sebagai Bosnia kedua.

Keempat tabloid tersebut lebih banyak menyoroiti aspek kekerasan dan menggambarkan kelompok Islam sebagai korban. Aksi pengangkatan senjata digambarkan semata-mata sebagai usaha untuk membela diri. Sebaliknya kelompok Kristen secara tak langsung digambarkan sebagai agresor, antek Barat, dan sekutu RMS. Penyerangan kelompok Kristen ke perkampungan Islam dideskripsikan seakan-akan penuh kekerasan, sadisme. Muncul beberapa label yang diberikan pada umat Kristen, antara lain: *Radikal, anasir separatistis, kelompok merah, massa merah*. Dalam pemilihan sumber berita, empat tabloid itu bersikap imparial dengan memakai lebih banyak sumber dari pihak Muslim dibandingkan sumber dari pihak Kristen (Sudibyo, 2006: 44-57).

Media massa tidak dapat netral dalam memberikan jasa informasi. Media memiliki kemampuan tertentu dalam menciptakan citra suatu realitas. Isi media forum yang menampilkan berbagai peristiwa yang terjadi di mana masyarakat memperoleh gambaran atau citra realitas sekaligus nilai dan penilaian normatif terhadap realitas tersebut. Makna yang diproduksi dan diterima pelaku sosial merupakan bentuk pemahaman dirinya terhadap suatu realitas.

Bentrokan atau pun tindakan kontra terhadap Ahmadiyah dan pengikutnya sering muncul dalam masyarakat. Media massa menjadi sumber informasi bagi masyarakat luas untuk mengetahui perkembangan kasus atau konflik yang melibatkan Ahmadiyah. Harian *Jawa Pos* tergolong intens mengangkat pemberitaan bentrokan yang melibatkan warga Pandeglang Banten dan jamaah Ahmadiyah. Media tersebut memberi perhatian yang cukup serius terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan Ahmadiyah. Harian *Jawa Pos* merupakan salah satu surat kabar terbesar di Indonesia yang mempunyai banyak anak cabang (*Jawa Pos Group*). Dengan *tagline* selalu ada yang baru, maka aktualitas selalu ditonjolkan dalam pemberitaannya, tidak terlepas dengan perkembangan pemberitaan Ahmadiyah. Media tersebut juga cenderung intens terhadap berita yang mengandung kontroversi.

Sebagai ruang publik, media massa tidak (akan pernah) mampu melaporkan peristiwa sama seperti fakta yang ada. Hal ini disebabkan oleh konstruksi media terhadap realitas tertentu yang tidak dapat dipisahkan dari campur tangan pihak luar maupun intern. Dan dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam pemberitaan.

Media memilih realitas mana yang diambil dan mana yang tidak diambil. Media juga memilih (secara sadar atau tidak sadar) aktor yang akan dijadikan sumber berita. Media bukan hanya memilih peristiwa dan menentukan sumber berita, melainkan juga berperan dalam mendefinisikan aktor dan peristiwa lewat bahasa yang dipakai. Untuk mendukung sisi berita yang ingin ditonjolkan, media melakukan pemilihan sumber berita yang sesuai (Eriyanto, 2002:24).

Posisi media dalam wacana pro dan kontra Ahmadiyah dan keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), berpengaruh terhadap cara mengcover insiden yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang Banten. Penggunaan sumber berita tentu akan disesuaikan dengan keberpihakan atau posisi media untuk memberikan penguatan terhadap posisi itu. Cara menetapkan, mengulangi kata-kata, dan gambar akan memperkuat kata-kata dan *visual image* yang merujuk pada beberapa isu. *Frame* bekerja agar beberapa ide lebih menonjol di dalam teks, atau setidaknya yang lain lebih tidak menonjol sehingga sama sekali tidak tampak.

Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja (Eriyanto, 2002: 107). Segala sesuatu yang mengandung kontroversi baik itu konflik, ketegangan, atau debat publik secara natural merupakan sesuatu yang secara alami mendatangkan ketertarikan bagi manusia. Semakin keras konflik yang terkandung dalam suatu peristiwa, semakin tinggi nilai beritanya. Rumus seperti ini, masih banyak dianut oleh kalangan jurnalis. Insiden yang terjadi di Cikeusik, Pandeglang Banten termasuk memiliki nilai berita yang tinggi. Hal tersebut tampak dari intensitas pemberitaan beberapa media terkhusus *Jawa Pos*.

Ketika meliput suatu konflik, orientasi liputan yang dominan terbingkai dalam jurnalisme perang (*war journalism*). Liputan lebih berorientasi pada arena atau tempat di mana konflik terjadi, jumlah korban

yang meninggal, rumah atau harta benda yang hancur. Media massa cenderung meliput konflik hanya pada aspek perilakunya saja atau aspek-aspek konflik yang kelihatan kasat mata seperti perilaku membunuh, membantai kelompok tertentu, menembak, mengebom, dan sebagainya. Dan lebih mengeksploitasi *the visible effect of violence*, dampak kekerasan yang tampak dibandingkan yang tidak tampak. Media massa sering menonjolkan aspek sensasional dan dramatisasi, kebanyakan konflik kekerasan hanya diliput sebagai peristiwa yang sepotong-sepotong. Sangat sedikit media yang meliput konflik secara memadai dan lengkap. Dan dalam proses peliputan, jurnalisme perang selalu menggunakan kacamata “kita-mereka” (Anto, 2002:xvi-xvii).

Pada dasarnya konflik dapat terjadi di berbagai tingkat yang berbeda, baik itu antarindividu, antarkelompok kecil di masyarakat, antarpemerintahan dan warga negara, antarpolitis, serta antarkelompok agama atau antarbangsa. Konflik timbul saat beberapa pihak yakin bahwa aspirasi mereka tidak dapat diraih bersama-sama, atau merasa adanya perbedaan dalam tata nilai, kebutuhan atau kepentingan mereka dan sengaja menggunakan kekuasaan mereka dalam usaha saling menyingkirkan, menetralkan atau mengubah untuk melindungi atau meningkatkan kepentingan mereka dalam interaksi tersebut (Mark Anstey dalam Toit, 2000:10).

Pakar di bidang konflik, Barbara Salert (1976) mendefinisikan konflik sebagai benturan struktur dalam masyarakat yang dinamis, antara struktur yang dominan dan struktur yang minimal. Motifnya adalah penguasaan sumber daya dalam masyarakat, baik sumber daya politik maupun ekonomi. Sedangkan Johan Galtung (1999) perintis konsep Jurnalisme Damai memberikan definisi konflik dalam perspektif resolutif. Menurutnya konflik disebabkan oleh segala sesuatu yang membuat orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Schermerhon, Hunt dan Osborn juga menjelaskan bahwa konflik terjadi saat muncul ketidaksepakatan dalam *setting* sosial yang dapat ditandai dengan friksi emosional antarindividu atau antarkelompok (Syahputra, 2006:12).

Terdapat empat tahap konflik, tahap pertama, konflik laten yang terjadi pada kondisi yang memiliki potensi untuk menghasilkan konflik, tetapi belum disadari oleh pihak-pihak yang terlibat. Tahap kedua, saat kelompok-kelompok merasa memiliki tujuan yang tidak sesuai, konflik terlihat muncul saat salah satu kelompok mulai mengungkapkan kebutuhan

akan perubahan, sementara pihak lainnya menetapkan bahwa setiap perubahan akan ditolak. Tahap ketiga terjadi ketika salah satu pihak mulai menggunakan kekuasaannya guna membawa perubahan, sedangkan yang lain siap menahannya. Jika konflik tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan berlanjut pada konflik dengan kekerasan, yang ditandai dengan meningkatnya emosi, hilangnya nyawa dan kerusakan harta benda.

Konflik juga cenderung muncul dalam situasi dimana sumber daya alam langka, kebutuhan manusia terancam, adanya ketidak seimbangan struktural, informasi yang tidak akurat, dan hubungan antar sesama yang buruk (Toit, 2000:21-25). Apa yang terjadi dalam bentrokan Ahmadiyah dengan warga, pada dasarnya merupakan konflik yang telah sampai pada tahap keempat, yaitu konflik dengan kekerasan.

Idealnya pemberitaan kasus Ahmadiyah harus mengikuti prinsip jurnalisme damai, yaitu prinsip yang diterapkan ketika memberitakan konflik. Jurnalisme damai sebagai aspek teknik, berorientasi pada masyarakat (*people oriented*), fokus dalam pencarian berita pada akar testimoni dan perspektif, sebagai pijakan pernyataan politik dan pengembangan konflik. Jurnalisme damai merupakan cara untuk menurunkan ketegangan, dengan membuat pemberitaan yang jujur (Linch & McGoldrick 2005:17).

Jurnalisme damai adalah praktik jurnalistik yang bersandar pada pertanyaan-pertanyaan kritis tentang manfaat aksi-aksi kekerasan dalam sebuah konflik dan tentang hikmah konflik itu sendiri bagi entitas kemanusiaan. Jurnalisme damai melihat perang/ pertikaian bersenjata sebagai sebuah masalah, sebagai ironi kemanusiaan yang tidak seharusnya terjadi.

Jurnalisme damai memberitakan konflik secara apa adanya dan memberikan porsi yang sama kepada semua pihak atau versi yang muncul dalam wacana konflik. Jurnalisme damai berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pihak dan menghindari keberpihakan. Jika perlu, jurnalisme damai menyebutkan nama pelaku kejahatan (*evil-doers*) di kedua belah pihak, guna mengungkapkan ketidakbenaran atau kebohongan masing-masing pihak (Sudibyo, 2006:167).

Jurnalisme damai merupakan kritik terhadap genre jurnalisme perang yang banyak dikembangkan media-media barat dan beberapa media di Indonesia. Dalam meliput perang, media-media ini terpola untuk menempatkan konflik yang terjadi sebagai persoalan “menang kalah” dan “ditundukkan menundukkan”. Pemberitaan media terlalu berfokus pada aksi-aksi

kekerasan yang mewarnai peperangan, tanpa banyak mengkaji akar konflik, berbagai dampak, serta bagaimana pemecahannya. Sedangkan jurnalisme perang cenderung mengekspos dan menekankan semangat untuk bertikai dan bermusuhan di antara pihak yang sedang berhadapan-hadapan.

Terdapat beberapa hal yang harus dihindari dalam penerapan jurnalisme damai. *Pertama*, menghindari penggambaran konflik sebagai dua pihak yang memperebutkan satu tujuan karena akan memunculkan satu pihak menang dan pihak yang kalah akan kecewa. *Kedua*, menghindari penerimaan dan pengungkapan perbedaan antara diri sendiri dan orang lain. Hal ini bisa berdampak munculnya rasa bahwa pihak lain merupakan ancaman atau memiliki sikap yang di luar batas. Sebaliknya mencari "orang lain" dalam "diri sendiri" atau dengan kata lain berupaya mencari persamaan dan tidak fokus pada perbedaan. *Ketiga*, memperlakukan konflik sebagai sesuatu yang tidak hanya terjadi di tempat dan waktu di mana kekerasan terjadi. Sebaliknya jurnalis seharusnya mencoba menelusuri hubungan dan konsekuensi bagi pihak di tempat lain yang berpotensi menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan di masa yang akan datang (Syahputra, 2006: 90-92).

Model jurnalisme damai berusaha menampilkan *framing* cerita dan penggambaran yang lebih luas, berimbang, adil, dan akurat, dalam memahami analisa dan transformasi konflik. Jurnalisme damai adalah seperti jurnalisme kesehatan (*health journalism*). Sebaliknya jurnalisme perang memiliki analogi seperti jurnalisme olahraga. Fokus pada kemenangan dalam *zero-sum game* (apa yang dimenangkan pihak A merupakan kerugian pihak B). Genre jurnalisme tersebut menggunakan konsep *win-lose*, menggambarkan dua petarung yang sedang memperebutkan kemenangan di arena olahraga. Sedangkan jurnalisme damai menerapkan pendekatan *win win solution* dan *deescalation conflict* (Lynch, 2007:8).

Tiga indikator yang menonjol pada jurnalisme damai, antara lain: menghindari penggunaan bahasa yang kasar (*demonizing*), menggunakan pendekatan yang tidak berpihak pada kelompok mana pun (*non-partisan approach*), dan berorientasi pada berbagai kelompok (*multi-party orientation*). Jurnalisme perang cenderung fokus pada apa yang terjadi di sini dan saat ini, menggunakan orientasi pada elit (*elite orientation*), dan menciptakan dikotomi baik dan buruk (Lee, 2009: 258-261).

Terdapat perbedaan antara jurnalisme damai dan jurnalisme perang. Dalam hal pendekatan, jur-

nalisme damai bersikap proaktif (antisipasi, memulai peliputan jauh sebelum perang atau kekerasan muncul), mengulas akibat kekerasan yang tidak tampak (trauma secara emosional, kerusakan keharmonisan masyarakat dan budaya), berorientasi pada masyarakat atau *people-oriented* (fokus pada masyarakat biasa sebagai aktor dan sumber informasi), memberitakan area persetujuan yang memicu solusi konflik, memberitakan penyebab dan konsekuensi konflik, menghindari penggunaan label sosok yang baik dan sosok yang jahat, orientasi pada banyak kelompok atau *multi-party orientation*, bukan partisan, orientasi menang-menang. Dari segi bahasa jurnalisme damai menghindari *victimizing language*, memberitakan apa yang telah dilakukan dan bisa dilakukan, serta bagaimana tindakan tersebut dapat ditiru (upaya perbaikan konflik), menghindari *demonizing language* (dan menggunakan deskripsi yang lebih tepat dan netral), obyektif dan moderat (menghindari kata-kata penuh emosi, memakai bahasa yang "keras" hanya untuk situasi mendesak, dan tidak membesar-besarkan peristiwa).

Pendekatan jurnalisme perang bersifat reaktif, mengutamakan ulasan mengenai akibat kekerasan yang kasat mata, berorientasi pada elit atau *elite-oriented*, fokus utama pada perbedaan yang memicu timbulnya konflik dan pada apa yang terjadi di sini dan saat ini, dikotomi antara sosok yang baik dan sosok yang jahat, korban dan penjahat, berorientasi pada dua kelompok atau *two-party orientation* (satu kelompok menang, sedangkan kelompok yang lain kalah), partisan, orientasi *zero-sum*. Dari sisi bahasa, jurnalisme perang menggunakan *victimizing language* (contoh: melarat, menghancurkan, menyedihkan, demoralisasi), menggunakan *demonizing language* (contoh: jahat, kejam, brutal, barbar, tidak manusiawi, lalim, bengis, biadab, ekstremis, fanatik, fundamentalis), menggunakan kata-kata penuh emosi (antara lain: *genocide, assassination, massacre, dan systematic*) (Lee, 2005: 271).

Pemberitaan mengenai insiden di Cikeusik yang muncul di media tidak hanya memberikan informasi mengenai peristiwa penyerangan, tetapi juga mengikutsertakan kontroversi aliran Ahmadiyah. Setiap media memiliki pandangan dan posisi tertentu terhadap Ahmadiyah yang dipengaruhi oleh ideologi masing-masing media. Media tentu berupaya membingkai insiden Cikeusik sesuai dengan pandangan yang mereka miliki. Maka penting dan menarik untuk melihat secara mendalam bagaimana *Jawa Pos* membingkai berita mengenai insiden Cikeusik

Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana *Jawa Pos* mbingkai dan menerapkan jurnalisme damai dalam pemberitaan insiden Cikeusik, Pandeglang, Banten.

### Metode Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode analisis framing. Populasi yang diteliti adalah pemberitaan harian *Jawa Pos* tentang penyerangan JAI dalam rentang waktu 8 Februari 2011 sampai dengan 28 Februari 2011. Pengumpulan serta analisis data untuk analisis framing ini dilakukan secara langsung dengan mengidentifikasi wacana berita mengenai *Ahmadiyah* pada harian *Jawa Pos*. Data hasil identifikasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perangkat-perangkat *framing* dengan menggunakan model Pan dan Kosicki. Model ini menekankan pada empat perangkat framing – Struktur sinaksis, skrip, tematik, dan retorik (Eriyanto, 2002:256-265).

Gambar 1. Perangkat Framing yang Diamati

STRUKTUR	PERANGKAI FRAMING	UNIT YANG DIAMATI
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SINTAKSIS Cara wartawan menyusun fakta</li> </ul>	1. Skema berita	Headline, Lead, Latar informasi, Kutipan sumber, Pernyataan, Penutup
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta</li> </ul>	2. Kelengkapan berita	5W+1H
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ TEMATIK Cara wartawan menulis fakta</li> </ul>	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraf, Proposisi, Kalimat, Hubungan antar kalimat
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RETORIS Cara wartawan menekankan fakta</li> </ul>	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, Idiom, Gambar/Foto, Grafis

Sumber: Eriyanto, 2002:256

### Hasil Penelitian

Analisis struktur sintaksis (*headline*, *lead*, latar informasi, sumber, dan penutup) menunjukkan dalam beberapa judul yang diangkat, *Jawa Pos* secara frontal menampilkan sikapnya yang kontra terhadap Ahmadiyah, seperti berita berjudul “Gubernur Jatim Larang Aktivitas Ahmadiyah, “SBY Minta Ahmadiyah

Berhenti”, “Istana Ditarget 10 Hari untuk Bubarkan Ahmadiyah.

Dalam menuliskan berita mengenai tuntutan pembubaran Ahmadiyah, *Jawa Pos* berusaha menonjolkan isu tersebut tidak hanya melalui judul, namun juga *lead* yang dituliskan. Unsur yang banyak dipakai saat memaparkan *lead* adalah *who* (siapa yang menuntut) dan *what* (apa yang menjadi tuntutan). *Who* yang ditampilkan dalam pemberitaan terkait pembubaran Ahmadiyah adalah ormas Islam (FPI, NU, MUI), Gubernur Jatim, dan Pemprov Banten. Unsur *what* yang diangkat berkaitan dengan informasi mengenai tuntutan revolusi dan pembubaran Ahmadiyah, Surat Keputusan Gubernur yang melarang aktivitas Ahmadiyah, dan Perda Banten yang melarang Ahmadiyah.

Bahkan beberapa kali pada pemberitaan mengenai hasil penyelidikan, harian ini tidak konsisten antara judul yang diangkat dan *lead* yang dituliskan. Edisi 18 Februari 2011, *Jawa Pos* mengangkat berita berjudul “Polisi Sebut Kiai Ujang Dalang Rusuh Ahmadiyah”, akan tetapi informasi yang dituliskan pada latar berita justru mengenai unjuk rasa ormas yang menuntut pembubaran Ahmadiyah.

Mengenai pemakaian narasumber, *Jawa Pos* tidak memberikan porsi yang berimbang. Narasumber yang kontra terhadap Ahmadiyah, yakni ormas Islam yang kerap menyuarakan pembubaran Ahmadiyah sangat sering dimunculkan pada pemberitaan, sedangkan sumber dari pihak yang pro atau setidaknya tidak menyudutkan Ahmadiyah jarang dimunculkan. *Jawa Pos* juga jarang menghadirkan narasumber dari anggota atau pun pengurus JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia) untuk melakukan *check* dan *balance*.

Berdasarkan analisis terhadap struktur skrip, *Jawa Pos* tampak kurang melakukan kontekstualisasi. Informasi mengenai insiden di Cikeusik, Pandeglang, Banten hanya disajikan secara permukaan. Perhatian terbesar harian ini tercurah pada aspek konflik yang paling mudah terlihat dan peristiwa yang paling dramatis. Aspek konflik yang jelas terlihat adalah dampak fisik baik itu korban jiwa ataupun kerusakan harta benda. *Jawa Pos* menonjolkan unsur *what* terkait dampak yang kasat mata (*visible effect*). Beberapa kali harian ini juga menekankan unsur *how* yang menjelaskan secara detail bagaimana jemaat Ahmadiyah diserang dan dianiaya oleh warga. Upaya mendramatisir insiden Cikeusik tampak jelas pada berita berjudul “Aku Lihat Suamiku Dikeroyok, lalu Dia Menghilang” edisi 9 Februari 2011, dan berita edisi 7 Februari 2011 dengan headline “Ahmadiyah Diserang, Tiga Tewas”, serta beberapa berita lainnya.

*Jawa Pos* memang memunculkan unsur *why*, akan tetapi penyebab yang dikemukakan hanyalah penyebab penyerangan bukan akar permasalahan yang sebenarnya. Dalam beberapa berita, yakni pada berita edisi 7 Februari 2011 harian ini menyatakan bahwa penyebab warga menyerang adalah sikap nekat mengadakan pertemuan bersama JAI, pertemuan tersebut disinyalir sebagai pengajian, sehingga warga resah, keresahan tertimbun dari sebelum-sebelumnya dan tereskalasi menjadi aksi menyerang.

Dari struktur tematik, *Jawa Pos* memakai koherensi sebab akibat yang bertujuan menekankan JAI sebagai penyebab dari insiden Cikeusik. Koherensi sebab akibat berkaitan dengan penonjolan unsur *why* 0 proposisi atau kalimat satu dilihat sebagai akibat atau sebab dari proposi lain (Eriyanto, 2001: 263). Secara keseluruhan terdapat beberapa tema yang diangkat: Tema pertama, penyebab penyerangan warga terhadap JAI di Cikeusik, Tema kedua, penetapan tersangka insiden Cikeusik, Tema ketiga yang paling ditonjolkan *Jawa Pos* adalah Ahmadiyah harus dibubarkan karena dianggap sebagai aliran sesat.

Berdasarkan analisis retorik, dalam hal pemilihan kata, *Jawa Pos* cenderung menggunakan pilihan kata yang memiliki konotasi negatif dan terkesan lebih-lebihkan, misalnya menyeret (kata ini dipakai saat menjelaskan beberapa polisi yang ikut ditetapkan sebagai tersangka). Salah satunya, pada edisi 7 Februari 2011, harian ini berusaha menggambarkan situasi konflik (insiden Cikeusik) seperti situasi yang mendesak dan mengerikan melalui beberapa pilihan kata, antara lain: kocar-kacir, mengenaskan, luka bacak. Aksi warga saat menyerang juga digambarkan sebagai tindakan yang melebihi batas, gambaran tersebut tampak melalui beberapa kata, yaitu: bawa golok, brutal, mengamuk, tidak manusiawi, membabi buta. Penggunaan kata semacam itu merupakan salah satu ciri pendekatan jurnalisme perang, yakni pemakaian *demonizing language* dan *victimizing language*. *Demonizing language* merupakan penggambaran suatu tindakan kekerasan fisik secara berlebihan, sedangkan *victimizing language* merupakan bahasa yang mendramatisir sisi lemah kelompok yang menjadi korban (Lee, 2004: 271).

## Pembahasan

*Jawa Pos* memunculkan beberapa frame dalam pemberitaannya, antara lain: “Penyebab penyerangan warga terhadap JAI,” “Keinginan Ahmadiyah untuk mendirikan masjid memicu kekesalan warga,”

“Ahmadiyah harus berhenti melanggar SKB untuk menghentikan konflik horizontal,” “Upaya pemerintah untuk mewujudkan perdamaian,” “Penyelidikan Awal Kasus Penyerangan Warga terhadap JAI.” Berikut pembahasan salah satu *frame* *Jawa Pos* “Penyebab penyerangan warga terhadap JAI” edisi 7 Februari 2011.

a. Sintaksis :

Headline : Ahmadiyah Diserang, Tiga Tewas

Subjudul : Sempat Melawan Ribuan Warga

Lead :

PANDEGLANG – Lebih dari seribu warga Cikeusik, Pandeglang, Banten, menyerang puluhan pengikut aliran Ahmadiyah kemarin (6/2). Tiga orang dilaporkan tewas dalam insiden di rumah Suparman, pimpinan jamaah Ahmadiyah, sekitar pukul 10.45 tersebut. Selain itu, delapan orang mengalami luka parah dan luka ringan. Dua mobil (innova dan Suzuki APV), dua motor, dan sebuah rumah di Desa Umbulan itu pun hangus karena di bakar massa

Latar informasi:

Kronologi penyerangan warga terhadap JAI di Cikeusik

**Kutipan sumber:**

- Saepudin, warga Desa Umbulan, Cikeusik  
Sekitar 21 pengikut Ahmadiyah malah mengucapkan kalimat bernada menantang. “Dari-pada menghentikan dan membubarkan diri, lebih baik mati,” sebut Saepudin, 39, warga Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, menirukan ucapan Suparman dan pengikutnya saat didatangi warga dan tokoh masyarakat Cikeusik.

Di pihak lain, Suparman dan pengikutnya juga sudah bersiap-siap dengan senjata tajam. Suparman pun telah meminta keluarganya meninggalkan rumah dan mengungsi ke Pandeglang. “Setelah itu, bentrokan antara warga dan jamaah Ahmadiyah tidak bisa dihindarkan,” tutur Saepudin seraya menyatakan bahwa warga Cikeusik sudah lama resah dengan aktivitas pengikut Ahmadiyah di kawasan tersebut.

- Abdul, pengikut Ahmadiyah  
Salah seorang anggota jamaah Ahmadiyah, Abdul, melihat polisi yang berjaga-jaga di sekitar rumah kewalahan. “Polisi sudah berjaga-jaga, tapi tidak seimbang dan terdesak. Saya kaget, kami panik. Mereka langsung me-

nyerbu. Mereka bawa golok,” tutur Abdul. Jamaah Ahmadiyah sempat melawan dengan melemparkan senjata seadanya. Sebagian lain pasrah dan hanya berdoa. Tetapi, upaya mereka tidak meredakan kemarahan penyerangan. Warga semakin membabi buta. Jamaah Ahmadiyah tak berdaya. “Saya sempat mengevakuasi teman saya. Saya sempat menghadang mereka (penyerang, Red),” ucap Abdul. “Umat Islam dilarang menganiaya orang yang sudah teraniaya!” teriak Abdul kepada penyerang.” Saya berupaya meredakan semampu saya,” jelasnya.

Tetapi, upaya Abdul itu sia-sia saja. Massa terus mengamuk. “Akhirnya kami terdesak ke belakang, ke sawah. Di situlah kami dihajar. Tidak manusiawi,” tuturnya. Abdul tidak mampu berbuat apa-apalagi. Dia juga terluka. Jamaah kocar-kacir.

Tak lama setelah penyerangan berhenti, jamaah Ahmadiyah yang terluka segera dibawa ke rumah sakit. “Hingga sekarang yang belum ketemu sekitar 10 orang. Mereka kocar-kacir semua. Ngeri melihat kejadian itu,” kata Abdul.

- Kapolres Pandeglang AKBP Alex Fauzi Kapolres Pandeglang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Alex Fauzi mengatakan, bentrok antara warga Ahmadiyah dan warga tidak hanya melibatkan warga setempat. “Ada juga warga dari beberapa wilayah terdekat, seperti Munjul dan Malingping,” ujarnya. Dia membenarkan bahwa korban tewas akibat bentrok tersebut tiga orang.

“Ada empat orang yang luka bacok, berasal dari jamaah Ahmadiyah,” kata Alex saat dikonfirmasi pada Minggu (6/2). Dia mengatakan sudah mengamankan tiga orang pimpinan Ahmadiyah. Yakni, Ketua Ahmadiyah Suparman dan istrinya warga Filipina, serta seorang pengurus Ahmadiyah Atep.

“Tiga orang ini diamankan saat meminta pengamanan ke Polsek Cikeusik karena ketakutan,” terang Alex. Dia lantas menceritakan banyaknya massa yang menyerang kediaman Suparman sempat membuat petugas kepolisian kewalahan. Namun, hingga kini, situasi berangsur-angsur bisa diatasi. Kondisi mulai bisa dikendalikan sekitar pukul 12.30. Sejumlah korban juga dievakuasi petugas.

“Kami menurunkan dua kompi, baik dari Polri

maupun TNI. Hingga kini, aktivitas warga sudah seperti biasa. Sementara TKP (kediaman Suparman, Red) sudah dipasang *police line* (garis polisi, Red),” tuturnya.

- Juru Bicara Ahmadiyah Zafrullah A. Pontoh Juru Bicara Ahmadiyah Zafrullah A. Pontoh meminta peristiwa tersebut diusut setuntas-tuntasnya dan pelaku segera ditangkap. Di Pandeglang sendiri baru kali ini peristiwa kekerasan terjadi yang melibatkan jamaah Ahmadiyah,” ujar Zafrullah

- Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Said Aqil Siradj mengutuk keras aksi penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah. “Tidak ada kekerasan yang dibenarkan. Kalau dicacimaki, dipukuli, dibunuh, diusir, dan rumahnya dirusak, mereka akan semakin fanatik,” jelas dia.

Said mengatakan, solusinya ialah mengajak jamaah Ahmadiyah kembali ke Islam yang benar melalui dialog. Said optimis, anggota Ahmadiyah bisa menerima dengan baik ajakan untuk kembali ke ajaran Islam jika pemahaman mereka diluruskan. “Jika nabi palsu Mushaddeq saja bertobat mengakui kekeliruanannya, mereka pasti bisa,” jelas dia.

- Ketua Umum MUI H Amidhan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) H. Amidhan menambahkan, kekerasan yang terjadi itu disebabkan pemerintah tidak tegas memberlakukan surat keputusan bersama (SKB) tentang pembubaran Ahmadiyah. Padahal, seharusnya jamaah Ahmadiyah mematuhi SKB pemerintah dan membubarkan diri dengan legawa. Tentunya, pemerintah harus menindak mereka yang menolak membubarkan diri.

“Telah ditetapkan bahwa Ahmadiyah tidak boleh mengajarkan ajarannya. Namun, kenyataannya Ahmadiyah tetap mengajarkan ajarannya,” kritik dia. Menurut Amidhan, SKB yang tidak dilaksanakan dengan tegas memicu keresahan warga. Apalagi, aktivitas Ahmadiyah terus dilakukan dan ketika beraktivitas mereka kerap dilindungi polisi. Hal itu yang justru memicu kesalahpahaman dan terjadilah bentrokan fisik. Karena itu, Amidhan meminta pemerintah tegas membubarkan Ahmadiyah. “Atau Ahmadiyah dijadikan agama tersendiri dan tidak masuk bagian agama Islam,” kat-

anya.

- b. Skrip : Unsur 5 W + 1 H ditampilkan secara lengkap

• **What:** Apa yang terjadi

Penyerangan warga terhadap JAI (Jemaat Ahmadiyah Indonesia)

• **Who:** Siapa yang menyerang dan diserang. Ribuan warga yang berasal dari beberapa daerah di Kecamatan Cikeusik, Cibalong, dan Malingping (pelaku penyerangan) dan puluhan pengikut Ahmadiyah yang sedang berkumpul di rumah Suparman di Cekeusik (korban).

• **Where:** Di mana lokasi terjadinya penyerangan

Penyerangan terjadi di rumah Suparman yang berada di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten.

• **When:** Kapan insiden tersebut terjadi

Insiden terjadi pada Minggu, 6 Februari 2011 sekitar pukul 10.45 WIB.

• **Why:** Penyebab penyerangan

Respon keras JAI yang saat itu diminta menghentikan pertemuan (seperti pengajian) di rumah Suparman memancing emosi massa warga yang berujung pada penyerangan. Warga resah jika JAI mengadakan pertemuan dan menyebarkan ajaran mereka yang dianggap sesat. Warga melarang JAI menggelar pengajian, namun mereka mengabaikan seruan tersebut.

• **How:** Bagaimana kronologi penyerangan

Sejak Minggu pagi JAI dari berbagai daerah berkumpul di rumah Suparman, warga resah jika mereka akan menyebarkan ajaran sesat, kemudian beberapa warga dan tokoh masyarakat Cikeusik datang dan mengimbau agar pertemuan dihentikan. Mereka merespon dengan keras imbauan tersebut dengan menyerukan, "Daripada menghentikan dan membubarkan diri, lebih baik mati". Warga menjadi emosi, lalu mulai menyerang JAI (massa warga telah menyiapkan batu, golok, dan minyak tanah).

- c. Tematik : (1) Aktivitas Ahmadiyah menjadi penyebab bentrokan, (2) Kecaman terhadap aksi kekerasan, (3) Pemerintah tidak tegas sehingga JAI terus melanggar SKB.

- d. Retoris :

• **Leksikon atau pemilihan kata:**

Dalam kutipan pernyataan Ketua Umum PB NU terdapat kata "mengutuk", kata tersebut dipakai untuk menekankan simpati yang men-

dalam pada para korban. Kata-kata lainnya yang dipakai adalah: tewas, kocar-kacir, tidak manusiawi, diamuk dan luka bacok. *Jawa Pos* juga berulang kali menyebutkan label sesat pada Ahmadiyah.

• **Gambar/ foto:**

*Jawa Pos* menekankan *visible effect* dengan menampilkan dua foto yang menunjukkan kerusakan materi dan korban tewas.

• **Elemen grafis:**

Grafis yang ditampilkan berupa potongan sketsa yang menceritakan kronologi penyerangan warga, terdapat tiga potong sketsa yang masing-masing dilengkapi dengan caption.

*Caption* grafis:

- Pukul 07.00. Sekitar 15 pengikut Ahmadiyah tiba di rumah Suparman, Desa Umbulan, Cikeusik, dengan menggunakan mobil Suzuki APV dan Kijang Innova.

- Pukul 07.30. Sebagian warga dan tokoh masyarakat Cikeusik mengimbau pengikut Ahmadiyah membubarkan diri secara baik-baik. Namun, seruan warga ditantang keras.

- Pukul 10.30. Karena peringatan direspons keras, warga yang sudah menyiapkan batu, golok, dan minyak tanah mulai menyerang. Polisi kewalahan meleraikan.

Dua foto yang ditampilkan juga dilengkapi dengan *caption*, seperti berikut:

HANCUR: Kondisi rumah Suparman, pimpinan Ahmadiyah Cikeusik, di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, setelah diamuk dan dibakar warga kemarin.

TRAGIS: Warga menemukan dua korban luka bacok dari jamaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten, kemarin.

## Penutup

Ahmadiyah sebagai kelompok minoritas mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan cenderung disudutkan. Ahmadiyah secara intens mendapat label dan stigma. Padahal dalam insiden Cikeusik, jemaat Ahmadiyah menjadi korban penyerangan warga, namun pemberitaan *Jawa Pos* justru menonjolkan JAI sebagai "biang kerok" dari penyerangan warga di Cikeusik dan aksi kekerasan sebelumnya. Seharusnya *Jawa Pos* melakukan kontekstualisasi serta mencari latar belakang dan permasalahan yang sebenarnya

dari insiden Cikeusik. Harian juga diharapkan lebih bijak dan tidak bias terhadap salah satu kelompok.

Metode penelitian ini menggunakan satu dari beberapa perangkat framing yang ada, yaitu model Pan & Kosicki, yang lebih memberikan penekanan pada pembahasan struktur bahasa mikro, sehingga belum bisa diketahui apakah hasil penelitian akan menunjukkan temuan yang sama apabila menggunakan perangkat framing yang berbeda. Berkaitan dengan sikap media, penelitian ini menitikberatkan pada insiden Cikeusik dan isu mengenai Ahmadiyah. Untuk itu diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait dengan konstruksi media massa terhadap kelompok minoritas di luar agama.

### **Daftar Pustaka**

- Anto, J. (2002). *Luka Aceh, Duka Pers*. Medan: Kipas
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta
- Iswara, Luwi. (2005). *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Lynch, Jake. (2007). *A Course in Peace Journalism*. Conflict & Communication Online, Vol.6, No.1. ([www.cc.regener-online.de](http://www.cc.regener-online.de))
- Sudiby, Agus. (2006). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: LKis Yogyakarta
- Syahputra, Iswandi. (2006). *Jurnalisme Damai*. Yogyakarta: Pilar Media
- Toit, Peter du. (2005). *Reportase Untuk Perdamaian*. Jakarta: Internews Indonesia
- Lee, Seow Ting. (2009). *Peace Journalism*. Dalam Wilkins Lee, Clifford G. Christians. (eds.), *The Handbook of Mass Media Ethics* (258-271). New York: Routledge